

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BERLAKANG

Renja Kecamatan Cicendo 2021 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kecamatan Cicendo 2021 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan kecamatan khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Kecamatan Cicendo 2021 memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Kecamatan Cicendo 2021 merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Kecamatan Cicendo 2021 berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Cicendo 2021 sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

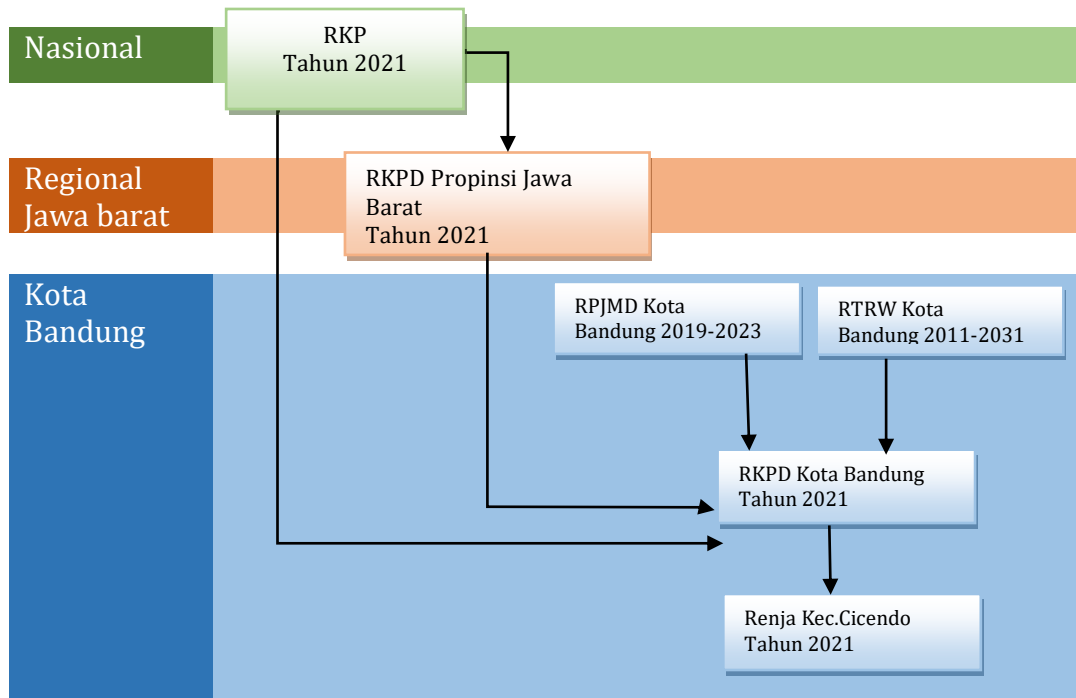
Proses penyusunan Renja Kecamatan Cicendo 2021 dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Kecamatan Cicendo 2021 dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Kecamatan Cicendo tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Cicendo 2019-2023 yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Kecamatan Cicendo 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Kecamatan Cicendo 2019-2023 dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Kecamatan Cicendo 2021 didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja Kecamatan Cicendo 2021 bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Kecamatan Cicendo 2021 didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Kecamatan Cicendo 2021 dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Cicendo 2019-2023 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Kecamatan Cicendo 2021 merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD Kota Bandung 2019-2023, Renstra Kecamatan Cicendo 2019-2023 dan RKPD Kota Bandung 2021. Renja Kecamatan Cicendo 2021 merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Renja Kecamatan Cicendo dengan Dokumen perencanaan lainnya



1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cicendo Tahun 2021 adalah:

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung;

5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah;
6. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2021 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan Kecamatan Cicendo periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Kecamatan Cicendo dan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Cicendo. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Cicendo Kota Bandung;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- Bab II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CICENDO TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Cicendo tahun lalu dan capaian renstra Kecamatan Cicendo
 - 2.2. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Cicendo
 - 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cicendo
 - 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- Bab III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CICENDO
- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
 - 3.2. Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Cicendo
- Bab IV : RENCANA DAN PENDANAAN KECAMATAN CICENDO
- Bab V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CICENDO TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CICENDO TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN CICENDO

Capaian Kinerja pelaksanaan Renja tahun 2021 beserta capaian Renstra Kecamatan Cicendo dengan bidang Kewenangan Administrasi Umum Pemerintahan serta misi meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan sasaran misi meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 (T-C.29)
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CICENDO DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN CICENDO s/d TAHUN 2020

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Cicendo) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Cicendo) Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Kecamatan Cicendo Tahun (2019)	Realisasi Renja Kecamatan Cicendo Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11=10/4
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan								
	Fasilitasi pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi pemberdayaan Lingkup RW	14 sub kegiatan	33 sub kegiatan	71 sub kegiatan	71 sub kegiatan	100%	104 sub kegiatan	104 sub kegiatan	100%
	Fasilitasi pemberdayaan Lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi pemberdayaan Lingkup PKK	6 sub kegiatan	8 sub kegiatan	8 sub kegiatan	8 sub kegiatan	100%	51 sub kegiatan	51 sub kegiatan	100%
	Fasilitasi pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	6 sub kegiatan	4 sub kegiatan	9 sub kegiatan	9 sub kegiatan	100%	32 sub kegiatan	32 sub kegiatan	100%
	Fasilitasi pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi pemberdayaan Lingkup LPM	6 sub kegiatan	4 sub kegiatan	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	100%	34 sub kegiatan	34 sub kegiatan	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Cicendo) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Cicendo) Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Kecamatan Cicendo Tahun (2019)	Realisasi Renja Kecamatan Cicendo Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4
	Urusan Penunjang									
	Urusan Fungsi Penunjang Lainnya									
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	prosentase partisipasi masyarakat								
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan</i>	<i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan</i>	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif								
	<i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i>	<i>pembentukan koperasi di tempat ibadah</i>	1 kelompok	-	18 kelompok	18 kelompok	100%	1 kelompok	1 kelompok	100%
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana								

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11=10/4
	<i>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	<i>Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif</i>	83,5%	4 laporan	30 RW	30 RW	100%	75%	75%	100%
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan								
	<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif</i>	18 kader	4 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	186 Kader	186 Kader	100%
	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan								
	<i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial</i>	<i>Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota</i>	6 kader/ kelompok	4 laporan	18 kader/ kelompok	18 kader/ kelompok	100%	6 kader/ kelompok	6 kader/ kelompok	100%
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik								
	<i>Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan</i>	<i>Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap</i>	9 jenis pelayanan	4 laporan	9 jenis pelayanan	9 jenis pelayanan	100%	5 laporan	5 laporan	100%
	<i>Kegiatan Pembinaan RT RW</i>	<i>laporan RW tepat waktu dan lengkap</i>	81,60%	4 laporan	467 RT/RW	467 RT/RW	100%	5 laporan	5 laporan	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11=10/4
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih								
	<i>Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan</i>	<i>luas RTH kecamatan terpelihara</i>	1363 m2	100 m2	100 m2	100%	100%	3500 m2	3500 m2	100%
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan</i>	<i>Panjang Drainase terpelihara</i>	1040 m2	4 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	46250 m2	46250 m2	100%
	<i>Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan</i>	<i>Panjang kerb terpelihara</i>	1040 m2	4 laporan	100 m2	100m2	100%	360 m2	360 m2	100%
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan								
	<i>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	<i>Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif</i>	81,60%	4 laporan	30 RW	30 RW	100%	75%	75%	100%
	<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif</i>	18 kader	4 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	186 Kader	186 Kader	100%
	<i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan social</i>	<i>Jumlah kelompok/kader RW siaga</i>	6 kader/ kelompok	4 laporan	18 kader/ kelompok	18 kader/ kelompok	100%	6 kader/ kelompok	6 kader/ kelompok	100%
	<i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i>	<i>pembentukan koperasi di tempat ibadah</i>	1 kelompok	-	18 kelompok	18 kelompok	100%	1 kelompok	1 kelompok	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11=10/4
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan</i>	<i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan</i>	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CICENDO

Penentuan tolok ukur kinerja serta indikator kinerja pelayanan Kecamatan Cicendo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang diselaraskan dengan Peraturan Walikota Bandung nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cicendo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan Cicendo				Realisasi Capaian Kinerja		Proyeksi Capaian Kinerja	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo			81,5	83,33	83,40	83,50	84,19		83,50	83,50
4.	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu			-	100,00	100,00	100	100		100	100
5.	Persentase Kelurahan Unggul			-	75,00	83,33	100	83,33		100	100
6.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			81,5	81,50	81,55	81,60	91,07		81,60	81,60

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN CICENDO

Berdasarkan uraian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Cicendo sampai dengan tahun 2020 telah dilaksanakan cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang telah ditetapkan dalam renstra.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Cicendo, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Cicendo dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Cicendo sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada SKPD
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cicendo dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Cicendo, sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
2. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD
3. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
4. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
5. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah

6. Masih kurangnya pemahaman aparat terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola)

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cicendo terdiri dari faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kurangnya sosialisasi dari Dinas/Instansi Tingkat Kota

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam kurun waktu 2019-2023, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam

penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cicendo dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan

internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) Pengamanan barang daerah;
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

2.4 RIVEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penentuan Urusan Wajib, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi kecamatan Cicendo, ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011. Sedangkan untuk program dan kegiatan non urusan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan SKPD.

Rancangan awal penyusunan RKPD tahun 2021 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini disebabkan :

- a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung
- b. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan Cicendo
- c. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan pada Kecamatan Cicendo.

Tabel 2.3 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 KOTA BANDUNG

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik		Rp. 2.479.081.200	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik		Rp. 2.479.081.200	
	<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	IKM Layanan Kependudukan	83,50	Rp. 55.896.000,-	<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	IKM Layanan Kependudukan	83,50	Rp. 55.896.000,-	
	<i>Pembinaan RT RW</i>	Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan RT RW Terbina	83,50%	Rp. 2.423.185.200,-	<i>Pembinaan RT RW</i>	Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan RT RW Terbina	83,50%	Rp. 2.423.185.200,-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum		Prosentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara		Rp. 3.122.547.835,-	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum		Prosentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara		Rp. 3.122.547.835,-	
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara	1040 m2	Rp. 2.800.358.275,-	<i>Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara	1040 m2	Rp. 2.800.358.275,-	
		Kecamatan dan Kelurahan	panjang drainase terpelihara	1040 m2			Kecamatan dan Kelurahan	panjang drainase terpelihara	1040 m2		
	<i>Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Taman terpelihara	9 taman	Rp. 235.092.000,-	<i>Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Taman terpelihara	9 taman	Rp. 235.092.000,-	
	<i>Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	Panjang kerb jalan yang terpelihara	1040 m2	Rp. 87.097.560,-	<i>Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	Panjang kerb jalan yang terpelihara	1040 m2	Rp. 87.097.560,-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan		Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan		Rp. 2.638.793.820,-	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan		Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan		Rp. 2.638.793.820,-	
	<i>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif</i>	81,6	Rp. 157.8551.460	<i>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif</i>	81,6	Rp. 157.8551.460	
	<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah RW berdaya</i>	81,6 %	Rp. 816.717.360,-	<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah RW berdaya</i>	81,6 %	Rp. 816.717.360,-	
		Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Posyandu Purnama</i>	16			Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Posyandu Purnama</i>	16		
	<i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah RW siaga</i>	27 RW	Rp. 104.026.440,-	<i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah RW siaga</i>	27 RW	Rp. 104.026.440,-	
		Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kagana kelurahan</i>	2 Kagana			Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kagana kelurahan</i>	2 Kagana		

	<i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah koperasi di tempat ibadah</i>	2	Rp. 69.124.440,-	<i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah koperasi di tempat ibadah</i>	2	Rp. 69.124.440,-	
		Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Koperasi Juara</i>	2			Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Koperasi Juara</i>	2		
	<i>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>1 Kegiatan musrenbang</i>	1 kegiatan	Rp. 70.374.120,-	<i>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>1 Kegiatan musrenbang</i>	1 kegiatan	Rp. 70.374.120,-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pemberdayaan Kewilayahan		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Rp. 7.400.000.000,-	Program Pemberdayaan Kewilayahan		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Rp. 7.400.000.000,-	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah RW Unggul</i>	81,60%	Rp. 5.600.000.000,-	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah RW Unggul</i>	81,60%	Rp. 5.600.000.000,-	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>% PKK Unggul</i>	81,60%	Rp. 600.000.000,-	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>% PKK Unggul</i>	81,60%	Rp. 600.000.000,-	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lingkup KARANG TARUNA</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>% Karang Taruna Unggul</i>	81,60%	Rp. 600.000.000,-	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lingkup KARANG TARUNA</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>% Karang Taruna Unggul</i>	81,60%	Rp. 600.000.000,-	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>% LPM Unggul</i>	81,60%	Rp. 600.000.000,-	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM</i>	Kecamatan dan Kelurahan	<i>% LPM Unggul</i>	81,60%	Rp. 600.000.000,-	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Cicendo akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Cicendo maupun berdasarkan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Tabel 2.4 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kecamatan Cicendo Kota Bandung

No	Uraian	Lokasi	Indikator	Anggaran
1	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan		Persentase Peran Kelembagaan Dan Masyarakat Dalam Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	2.638.793.820
1.1	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan		Jumlah RW Yang Memiliki Siskamling Aktif	1.578.551.460
1.2	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan		Jumlah RW Berdaya	816.717.360
			Jumlah Posyandu Purnama	
1.3	Kegiatan Peingkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan		Jumlah RW Siaga	104.026.440
			Jumlah Kagana Kelurahan	
1.4	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan		Jumlah Koperasi Di Tempat Ibadah	69.124.440
			Jumlah Koperasi Juara	
1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Jumlah Kegiatan Musrenbang	70.374.120

2	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum		Prosentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH Dan Saluran Dalam Kondisi Terpelihara	3.122.547.835
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Drainase Dan Kebersihan Lingkungan		Panjang Ruas Jalan Yang Terpelihara Panjang Drainase Terpelihara	2.800.358.275
2.2	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan		Jumlah Taman Terpelihara	235.092.000
2.3	Kegiatan Pengecetan Kerb		Panjang Kerb Jalan Yang Terpeliharaan	87.097.560
3	Program Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan Dan Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	2.479.081.200
3.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		IKM Layanan Kependudukan	55.896.000
3.2	Kegiatan Pembinaan RT/RW		Cakupan RT RW Terbina	2.423.185.200
	JUMLAH NON PRIORITAS			8.240.422.855
4	Program Pemberdayaan Kewilayahan		Tingkat Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Unggul	7.400.000.000
4.1	Pemberdayaan Lingkup RW		% RW Unggul	5.600.000.000
4.2	Pemberdayaan Lingkup PKK		% PKK Unggul	600.000.000
4.3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna		% Karang Taruna Unggul	600.000.000
4.4	Pemberdayaan Lingkup LPM		% LPM Unggul	600.000.000
	JUMLAH PRIORITAS			7.400.000.000
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.145.377.014
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Jumlah Jasa Bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terealisasi	246.159.360
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perizinannya	17.691.040

5.3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			5.346.000
5.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	167.760.000
5.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Jumlah Unit Peralatan Kerja Yang Di Perbaiki Yang Terrealisasi	32.376.000
5.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor'		Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	213.260.640
5.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan'		Jumlah Laporan Penyediaan Cetak dan Penggandaan Yang Terrealisasi	102.467.280
5.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor'		Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Terrealisasi	22.951.680
5.9	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor'		Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Terrealisasi	450.000.000
5.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Terrealisasi	48.135.000
5.11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan	27.242.640
5.12	Penyediaan Makanan Dan Minuman		Jumlah Laporan Penyediaan Makanan Dan Minuman Terrealisasi	97.292.712
5.13	Rapat Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12.694.662
5.14	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran		Jumlah Laporan Jasa Bulanan Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	702.000.000
6	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana			1.603.769.600

6.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Yang Terpelihara	800.000.000
6.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Kec+Kel)		Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	803.769.600
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			250.000.000
7.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Kec+Kel)		Jumlah Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya	250.000.000
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			150.000.000
8.1	Pembinaan Kinerja Aparatur (Kec+Kel)		Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	150.000.000
	NON URUSAN			4.149.146.614
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG			19.789.569.469

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CICENDO

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2019 yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL,
NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan

sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.

Misi Kota Bandung Tahun 2013-2019 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : *Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung*. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (*sustainable*) dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Cicendo Kota Bandung akan berperan melaksanakan tugas umum pemerintahan, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Cicendo Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggungjawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen kecamatan.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Cicendo Kota Bandung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan kualitas pelayanan public	Nilai Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo	Nilai Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CICENDO

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Di dalam melaksanakan Program dan kegiatan pembangunan, Kecamatan Cicendo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja Kecamatan Cicendo yang direncanakan untuk kegiatan pada periode tahun 2021 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan kecamatan, kami sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 (T.C-33)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Cicendo Tahun 2021
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kecamatan Cicendo Kota Bandung**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6
				CICENDO								
4	34	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan dan Kelurahan	83,50	2.479.081.200,-	APBD Kota Bandung		83,55	2.726.989.320,-
4	34	20	01	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	Kecamatan dan Kelurahan	83,50	55.896.000,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	83,55	61.485.600,-
4	34	20	02	Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	Kecamatan dan Kelurahan	100%	2.423.185.200,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	100%	2.665.503.720,-

4	34	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Prosentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara	Kecamatan dan Kelurahan	76%	3.122.547.835,-	APBD Kota Bandung		77%	3.434.802.619,-
4	34	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Ruas Jalan yang terpelihara	Kecamatan dan Kelurahan	1363 m2	2.800.358.275,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	1363 m2	3.080.394.103,-
				panjang drainase terpelihara	1059 m2		1059 m2					
4	34	42	15	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah Taman terpelihara	Kecamatan dan Kelurahan	7 taman	235.092.000,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	7 taman	258.601.200,-
4	34	42	16	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Kecamatan dan Kelurahan	1363 m2	87.097.560,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	1363 m2	95.807.316,-
4	34	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan dan Kelurahan	76%	2.638.793.820,-	APBD Kota Bandung		77%	2.902.673.202,-
4	34	28	02	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Kecamatan dan Kelurahan	40	1.578.551.460,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	42	1.736.406.606,-
4	34	28	03	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah RW berdaya	Kecamatan dan Kelurahan	22	816.717.360,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	24	898.389.096,-
				Jumlah Posyandu	74 Posyandu		74 Posyandu					

					Purnama							
4	34	28	04	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah RW siaga	Kecamatan dan Kelurahan	30 RW	104.026.440,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	32 RW	114.429.084,-
					Jumlah Kagana kelurahan		2 Kagana				3 Kagana	
4	34	28	01	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah koperasi di tempat ibadah	Kecamatan dan Kelurahan	2	69.124.440,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	3	76.036.884,-
					Jumlah Koperasi Juara		9				10	
4	34	28	05	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Kegiatan Musrenbang	Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	70.374.120,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	1 Kegiatan	77.411.532,-
4	34	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan	81,60	7.400.000.000,-	APBD Kota Bandung		81,65	7.400.000.000,-
4	34	26	01	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	% RW Unggul	Kelurahan	61.00%	5.600.000.000,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	61,05%	5.600.000.000,-
4	34	26	02	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	% PKK Unggul	Kelurahan	95.10%	600.000.000,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	95.15%	600.000.000,-
4	34	26	03	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup KARANG TARUNA	% Karang Taruna Unggul	Kelurahan	83.10%	600.000.000,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	83.15%	600.000.000,-
4	34	26	04	Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	% LPM Unggul	Kelurahan	87,20%	600.000.000,-	APBD Kota Bandung	Kegiatan Lanjutan	87,25%	600.000.000,-

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan Kinerja sebagai aktifitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang merupakan salah satu tujuan dari akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan sebagai outputnya adalah berupa Rencana Kerja.

Perencanaan Kinerja Kecamatan Cicendo sebagai dokumen perencanaan yang merupakan turunan dari Perencanaan Strategis (Renstra) yang sifatnya tahunan, memuat sasaran, program/kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya.

Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen rencana kerja ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan bersumber dari APBD.

Dengan kesungguhan dari semua pihak serta komitmen yang tinggi untuk melaksanakan agenda kegiatan Pemerintah Kecamatan Cicendo Tahun 2020 akan sangat menentukan keberhasilan rencana kerja ini.

Bandung, 17 Januari 2020

Camat Cicendo,

Drs. BIRA GUMBIRA, S.STP., M.Si

NIP. 19750503 199603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allh SWT, atas karunia dan Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cicendo Tahun 2020.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perubahan dari pedoman Penyusunan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman perencanaan kinerja tahunan Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cicendo Tahun 2020 ini masih banyak terdapat kekurangan, mudah-mudahan nanti dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Cicendo.

Bandung, 17 Januari 2020

Camat Cicendo,

Drs. BIRA GUMBIRA, S.STP., M.Si

NIP. 19750503 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan tujuan	4
1.4 Sistematika	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CICENDO TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Cicendo Tahun lalu dan capaian renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicendo	10
2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan.....	12
2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD	17
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CICENDO	29
3.1 Telahan terhadap kebijakan nasional	29
3.2 Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Cicendo	31
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CICENDO	33
BAB IV PENUTUP	39